



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118

Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

OPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/45/ITDA-PP/V-2025

TANGGAL : 14 MEI 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/ /Itda-PP/V-2025 Padang Panjang, Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian Kinerja
Organisasi Tahun 2024

Yth. Kepala Sekretariat DPRD
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD belum menindaklanjuti secara keseluruhan, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Telah mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra Awal dan Perubahan, Renja Awal dan Perubahan) pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.
- b. Telah mencantumkan sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan pada *Cascading*;
- c. Telah melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi Kinerja secara berkala.
- d. Telah melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
- e. Telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Telah menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja dengan mengacu kepada sasaran yang ada pada Renstra.
- g. Telah menyajikan seluruh informasi perbandingan kinerja dengan target tahunan; Menyajikan seluruh informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Laporan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

III. Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang memperoleh nilai **69,30** atau predikat **B**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Sekretariat DPRD telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kualitas rumusan hasil indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran belum sepenuhnya digambarkan pada Rencana Kerja;
- 2) Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan *existing*. Penjenjangan kinerja PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh *critical success factor* atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada BAB II poin (2); dan
- 3) Dokumen crosscutting belum menggambarkan hubungan kinerja Sekretariat DPRD dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pencapaian sasaran strategis (eksternal) dan hubungan kinerja antar bidang pada Sekretariat DPRD dalam pencapaian sasaran program/kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Sekretariat DPRD telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi pedoman formulasi penghitungan juga telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP);
- 2) Belum dilakukan pengukuran secara berkala terhadap capaian kinerja level eselon III dan IV (program/kegiatan/sub kegiatan); dan
- 3) Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.

3. Pelaporan Kinerja

Sekretariat DPRD telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang namun masih terdapat beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti secara memadai sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75	86	114,67	110	15%	93,50
2	Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	85,75	114,33	110	15%	93,50
Total Capaian PK (4):								187,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO):								93,50
Predikat PKO:								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

1. Merumuskan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kerja;
2. Melakukan Penjenjangan kinerja PD dengan mempertimbangkan *logical framework* dan mengidentifikasi seluruh *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi;

3. Membuat dokumen crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja Dinas Pangan Pertanian dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pencapaian sasaran strategis (eksternal) dan hubungan kinerja antar bidang pada Sekretariat DPRD dalam pencapaian sasaran program/kegiatan; dan
4. Melakukan Pemantauan secara berkala terhadap capaian dari rencana aksi.

b. Pengukuran Kinerja

1. Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP)
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

1. Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja; dan
2. Mempublikasikan laporan kinerja pada website resmi Pemerintah Kota Padang Panjang.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



Inspektur,

Dr. Syahril, S.H, MH, CGCAE

Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004